

**KEBIJAKAN ASPIRASI DALAM PERSPEKTIF *PORK BARREL POLITICS* PADA
PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH ASPIRASI
HETIFAH DI KOTA SAMARINDA**

Awwaliah Maghfirah Suriyani¹, Laila Kholid Al Firdaus²
Email: awwaliah.maghfirah@gmail.com

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Fenomena kebijakan aspirasi dalam praktiknya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan publik, tetapi juga mengandung dimensi politik yang tidak terpisahkan dari relasi antara wakil rakyat dan konstituen. Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda menjadi salah satu contoh kebijakan yang merepresentasikan dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan aspirasi dalam program tersebut dijalankan sebagai praktik *pork barrel politics* di Kota Samarinda sebagai bagian dari daerah pemilihan Kalimantan Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan studi dokumentasi dan literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pola distribusi bantuan, peran aktor, serta hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KIP-K Aspirasi Hetifah tidak hanya berperan sebagai kebijakan pendidikan yang memperluas akses bagi kelompok kurang mampu, tetapi juga mencerminkan praktik *pork barrel politics*. Hal ini terlihat dari adanya penargetan kelompok tertentu, keterkaitan dengan daerah pemilihan, keterlibatan jaringan aktor politik, serta keberlanjutan program yang membentuk relasi jangka panjang antara legislator dan konstituen. Program ini juga turut mendorong terbentuknya *political engagement* dan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dipahami sebagai instrumen sosial sekaligus strategi representasi politik.

Kata kunci: kebijakan aspirasi, *pork barrel politics*, KIP Kuliah, konstituen, representasi politik

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

**ASPIRATIONAL POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF PORK BARREL
POLITICS IN THE KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) SCHOLARSHIP
PROGRAM: THE CASE OF HETIFAH'S ASPIRATIONAL SCHOLARSHIP IN
SAMARINDA CITY ABSTRACT**

ABSTRACT

The phenomenon of aspirational policies in practice not only functions as an instrument to meet public needs, but also contains a political dimension that is inseparable from the relationship between people's representatives and constituents. The Kartu Indonesia Pintar (KIP) College Scholarship Program under the Hetifah Aspiration Initiative in Samarinda City serves as an example of a policy that embodies these dynamics. This study aims to analyze how the aspiration policy in the program is carried out as a practice of pork barrel politics in Samarinda City as part of the East Kalimantan constituency. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with documentation and literature studies. The analysis was carried out in a descriptive-analytical manner to reveal the pattern of aid distribution, the role of actors, and the relationship between public policy and political interests. The results of the study show that the KIP-K Aspirasi Hetifah Program not only plays an educational role as an education policy that expands access for underprivileged groups, but also reflects the practice of pork barrel politics. This can be seen from the targeting of certain groups, the linkage with the electoral district, the involvement of political actor networks, and the sustainability of programs that form long-term relationships between legislators and constituents. This program also encourages the formation of political engagement and strengthens the public's positive perception of the performance of the people's representatives. Thus, this policy can be understood as a social instrument as well as a strategy for political representation.

Keywords: aspirational policy, pork barrel politics, KIP Kuliah, constituents, political representation.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang

Kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara dalam penyediaan layanan publik. Dalam konteks demokrasi, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai wujud relasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan

yang mencerminkan hal tersebut adalah kebijakan aspirasi, yaitu kebijakan yang bersumber dari kebutuhan masyarakat dan disalurkan melalui wakil rakyat untuk diwujudkan dalam bentuk program konkret. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), yang memberikan ruang bagi anggota legislatif untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Dalam perkembangannya, sektor pendidikan menjadi salah satu bidang

strategis dalam kebijakan aspirasi. Pendidikan merupakan hak fundamental warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, akses terhadap pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada kelompok usia 19–24 tahun berada pada angka 52,12%, yang mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan tinggi masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan akses, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, serta keterbatasan dukungan kebijakan. Dalam konteks tersebut, program beasiswa menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi hambatan ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi melalui skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Selain jalur reguler, dalam praktiknya terdapat skema penyaluran melalui jalur aspirasi anggota legislatif. Beasiswa KIP Kuliah aspirasi memberikan ruang bagi anggota DPR RI untuk mengusulkan calon penerima berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun di

daerah pemilihannya. Secara substansi, tidak terdapat perbedaan signifikan antara KIP Kuliah reguler dan aspirasi, namun perbedaannya terletak pada mekanisme pengusulan penerima yang melibatkan aktor politik.

Di Kalimantan Timur, salah satu implementasi program ini adalah Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi yang diinisiasi oleh anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang belum terakomodasi melalui jalur reguler. Secara skema, program ini merupakan bagian dari PIP Pendidikan Tinggi yang menasar mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin, dengan komponen bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan tinggi di wilayah tersebut. Terdapat sekitar 50 perguruan tinggi yang menampung mahasiswa dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, sehingga menjadikan Samarinda sebagai pusat konsentrasi mahasiswa. Komposisi ini didominasi oleh kelompok usia muda, khususnya mahasiswa pada rentang usia produktif yang juga termasuk dalam kategori pemilih dalam pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pemilih usia 17–40

tahun mencapai sekitar 53–55% dari total pemilih nasional pada Pemilu 2024. Selain itu, posisi Samarinda sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) turut memperkuat dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut.

Dalam perspektif politik, distribusi program melalui jalur aspirasi dapat dipahami melalui konsep *pork barrel politics*, yaitu praktik alokasi sumber daya publik oleh aktor politik kepada kelompok atau wilayah tertentu dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan dukungan politik. Praktik ini menunjukkan bahwa program kebijakan publik, termasuk di sektor pendidikan, tidak sepenuhnya terlepas dari dimensi politik, terutama ketika melibatkan aktor legislatif dalam proses distribusinya. Dengan demikian, kebijakan aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari strategi politik dalam konteks elektoral.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan pendidikan, tetapi juga berada dalam konteks relasi antara distribusi kebijakan publik dan dinamika politik representatif. Keterlibatan aktor legislatif, karakteristik penerima yang berada dalam kelompok usia pemilih, serta konteks sosial Kota

Samarinda menunjukkan adanya keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan praktik politik elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi dalam perspektif *pork barrel politics* guna memahami bagaimana distribusi sumber daya publik tersebut memiliki implikasi politik dalam konteks lokal.

A.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan aspirasi pada Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Hetifah dijalankan sebagai praktik *Pork Barrel Politics* di Kota Samarinda?

A.3 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penyajian gambaran yang komprehensif terkait objek yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi empiris di lapangan secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh (P. Lamadang et al., 2022). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan implementasi

kebijakan aspirasi dalam Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi serta keterkaitannya dengan dinamika politik representatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai pelaksanaan program di lapangan serta dinamika yang terjadi dalam proses penyaluran beasiswa. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, meliputi aktor utama dan pihak terkait, guna memperoleh data yang relevan dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dilakukan secara luring maupun daring dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan dokumen resmi, arsip, laporan, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga teknik ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan (Huberman, 2014).

Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menyaring informasi penting serta mengeliminasi data yang tidak relevan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis.

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Proses analisis ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi utama, yaitu Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar di DKI Jakarta serta Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansi dengan objek penelitian, yaitu implementasi Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi. Komisi X DPR RI menjadi lokasi untuk memperoleh informasi dari aktor legislatif sebagai penginisiasi kebijakan, sedangkan Kota Samarinda dipilih karena merupakan wilayah pelaksanaan program sekaligus

lokasi penerima manfaat beasiswa. Dengan demikian, kedua lokasi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif dari sisi perumusan kebijakan maupun implementasinya di lapangan.

5. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian politik elektoral, *pork barrel politics* dipahami sebagai salah satu bentuk konkret dari praktik patronase politik. Menurut Aspinall dan Sukmajati (2014), *pork barrel* merujuk pada distribusi proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari anggaran publik dan diarahkan kepada wilayah geografis tertentu dengan tujuan implisit memperoleh dukungan politik. Meskipun secara formal dikemas sebagai kebijakan publik, dalam praktiknya distribusi tersebut sering kali mengandung kepentingan elektoral. Program yang disalurkan umumnya bersifat programatik, seperti bantuan sosial, layanan pendidikan, atau proyek pembangunan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga berpotensi memperkuat loyalitas politik penerima.

Secara konseptual, *pork barrel politics* merupakan praktik pengalokasian sumber daya publik oleh aktor politik, khususnya legislator, kepada konstituen di wilayah tertentu dengan tujuan strategis dalam kompetisi politik (Smith, 2011). Praktik ini memberikan keuntungan elektoral bagi aktor politik karena dapat meningkatkan

elektabilitas melalui distribusi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, *pork barrel* tidak lagi terbatas pada pemberian manfaat individual, tetapi lebih banyak diwujudkan dalam bentuk program kolektif yang menysasar kelompok masyarakat atau wilayah tertentu, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik.

Karakteristik utama *pork barrel politics* meliputi beberapa aspek. Pertama, distribusi dilakukan oleh aktor politik baik legislatif maupun eksekutif yang memiliki kepentingan elektoral. Kedua, sumber pembiayaan berasal dari anggaran negara. Ketiga, distribusi bersifat teritorial dan diarahkan pada wilayah yang memiliki nilai strategis secara politik (Aspinall & Sukmajati, 2014). Selain itu, praktik ini sering kali berkaitan dengan upaya petahana dalam membangun citra positif, menunjukkan kinerja, serta menarik dukungan pemilih melalui realisasi program konkret (Ferejohn, 1974).

Dari sisi relasi politik, *pork barrel politics* memiliki kemiripan dengan klientelisme karena sama-sama melibatkan hubungan timbal balik antara aktor politik dan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu pada *pork barrel*, distribusi manfaat umumnya dilakukan sebelum pemilu untuk memengaruhi preferensi pemilih, sedangkan dalam klientelisme, manfaat

diberikan setelah pemilu sebagai bentuk balas jasa kepada pendukung (Stokes, 2013). Dengan demikian, *pork barrel* lebih berorientasi pada strategi mobilisasi dukungan elektoral melalui kebijakan publik.

Dalam konteks Indonesia, praktik *pork barrel politics* kerap dikaitkan dengan dana aspirasi yang disalurkan oleh anggota legislatif. Secara normatif, dana aspirasi bertujuan untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan diwujudkan dalam program pembangunan. Namun, dalam praktiknya distribusi tersebut tidak selalu berbasis pada kriteria objektif, melainkan mempertimbangkan aspek politik seperti kedekatan dengan konstituen dan potensi dukungan elektoral. Fenomena serupa juga ditemukan dalam skema *constituency development funds* di berbagai negara, yang menunjukkan bahwa praktik ini merupakan fenomena umum dalam sistem demokrasi representatif (van Zyl, 2010).

Sebagai bagian dari patronase, *pork barrel politics* mengandung unsur kontingensi, yaitu adanya harapan timbal balik berupa dukungan politik dari penerima manfaat (Aspinall & Sukmajati, 2014). Distribusi sumber daya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai sarana membangun jaringan politik yang bersifat klientelistik. Dalam praktiknya, penerima manfaat dapat berkembang menjadi basis dukungan politik

yang loyal, bahkan menjadi bagian dari jaringan politik seperti relawan atau tim kampanye. Untuk memahami praktik *pork barrel politics* secara lebih operasional, penelitian ini menggunakan lima indikator analisis, yaitu:

1. Sumber dan bentuk bantuan,
2. Aktor politik dan jaringan
3. Pola distribusi (targeting)
4. Waktu distribusi
5. Tujuan distribusi

Kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa *pork barrel politics* merupakan praktik yang menggabungkan dimensi kebijakan publik dan kepentingan politik dalam satu kerangka yang saling terkait. Distribusi sumber daya publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai strategi politik dalam membangun dan mempertahankan dukungan dalam sistem demokrasi representatif. Dengan demikian, *pork barrel politics* dapat dipahami sebagai mekanisme konversi sumber daya negara menjadi dukungan elektoral melalui distribusi program yang bersifat selektif, terarah, dan mempertimbangkan dinamika politik (Saragintan, 2011).

B. PEMBAHASAN

B.1 Sumber dan Bentuk Bantuan

Dimensi sumber dan bentuk bantuan dalam konsep *pork barrel politics* menekankan pada asal-usul sumber daya serta bentuk konkret distribusi bantuan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, Program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi menunjukkan bahwa sumber bantuan berasal dari anggaran publik (APBN) yang dikelola oleh pemerintah melalui Kemendiknas, namun disalurkan melalui mekanisme aspirasi yang melibatkan aktor legislatif sebagai perantara.

Program ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang bertransformasi dari program Bidikmisi menjadi KIP Kuliah sejak tahun 2020. Jalur aspirasi muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kuota KIP Kuliah reguler, sehingga berfungsi sebagai tambahan kuota yang diperjuangkan melalui mekanisme formal DPR, seperti rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan kementerian.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran legislator dalam konteks ini bersifat sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan negara. Meskipun program ini bersumber dari dana publik, keterlibatan aktor politik dalam proses pengusulan dan distribusi menunjukkan adanya dimensi politik dalam implementasinya.

Dari sisi bentuk bantuan, program ini diwujudkan dalam bentuk beasiswa pendidikan yang mencakup biaya kuliah (UKT) dan biaya hidup bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Terdapat dua skema bantuan, yaitu KIP Kuliah Aspirasi (biaya pendidikan dan biaya hidup) serta KIP Kuliah B2P Aspirasi (hanya biaya pendidikan). Perbedaan ini menunjukkan adanya kategorisasi bantuan berdasarkan kriteria tertentu, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakjelasan informasi bagi penerima.

Selain itu, data di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerima melalui jalur aspirasi cenderung lebih besar dibandingkan jalur reguler. Hal ini mengindikasikan bahwa jalur aspirasi tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi.

Di sisi lain, penggunaan nama personal dalam program yang bersumber dari APBN menjadi sorotan kritis. Hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas antara kebijakan publik dan personalisasi politik, yang dalam perspektif *pork barrel politics* dapat memperkuat asosiasi antara bantuan yang diterima dengan figur politik tertentu.

3.2 Aktor Politik dan Jaringan

Pelaksanaan Program KIP Kuliah Aspirasi Hetifah menunjukkan bahwa distribusi bantuan tidak dilakukan secara langsung oleh negara, melainkan melalui

keterlibatan berbagai aktor dan jaringan. Dalam hal ini, legislator berperan sebagai penginisiasi program sekaligus representasi politik yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan publik.

Peran ini tidak hanya bersifat formal berdasarkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tetapi juga tercermin dalam upaya aktif mendorong program pendidikan melalui jalur aspirasi. Program beasiswa ini menjadi salah satu bentuk konkret pelaksanaan fungsi representasi, di mana kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan diartikulasikan menjadi program kebijakan.

Dalam implementasinya, legislator tidak bekerja sendiri, tetapi didukung oleh jaringan perantara, seperti tenaga ahli dan Hetifah Scholarship Association (HSA). HSA berperan dalam menjaring calon penerima, menyebarkan informasi, serta melakukan pendampingan kepada mahasiswa. Strategi yang digunakan mencakup pemanfaatan media sosial, jaringan sekolah dan kampus, serta penyebaran informasi dari mulut ke mulut melalui alumni penerima.

Keberadaan jaringan ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan bersifat *network-based*, yang menggabungkan struktur formal dan informal. Selain itu, tim perantara juga berperan dalam proses seleksi dan verifikasi calon penerima melalui tahapan administrasi dan wawancara sebelum diusulkan ke

kementerian.

Pengawasan program dilakukan secara berlapis, melibatkan kampus, kementerian, serta tim HSA. Kampus memiliki peran utama dalam pengawasan akademik, sementara HSA berfungsi dalam monitoring non-akademik dan pendampingan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dijalankan melalui mekanisme kolaboratif antara aktor politik, jaringan perantara, dan institusi pendidikan.

Temuan lain menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak hanya melihat program ini sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai representasi kehadiran legislator. Hal ini memperlihatkan adanya relasi simbolik antara bantuan yang diterima dengan figur politik, yang dalam perspektif *pork barrel politics* dapat memperkuat legitimasi dan kedekatan dengan konstituen.

3.3 Pola Distribusi (Targeting)

Pola distribusi dalam Program KIP Kuliah Aspirasi menunjukkan bahwa bantuan tidak diberikan secara merata, melainkan ditargetkan kepada kelompok tertentu, yaitu mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodasi dalam jalur reguler.

Distribusi bantuan berbasis wilayah juga terlihat jelas, di mana program ini difokuskan pada daerah pemilihan Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda sebagai pusat pendidikan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi

bantuan bersifat teritorial dan mempertimbangkan nilai strategis wilayah dalam konteks politik.

Proses penentuan penerima dilakukan melalui mekanisme seleksi berlapis yang melibatkan kampus dan tim program. Kampus berperan dalam melakukan verifikasi administratif, akademik, serta kondisi sosial ekonomi mahasiswa, termasuk melalui pengecekan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

Namun demikian, temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat fleksibilitas dalam kriteria penerima, khususnya pada jalur aspirasi. Beberapa mahasiswa yang tidak memenuhi syarat pada jalur reguler tetap dapat memperoleh bantuan melalui jalur aspirasi. Hal ini menunjukkan bahwa selain berbasis kebutuhan, distribusi juga mempertimbangkan aspek peluang dan akses melalui jaringan yang tersedia.

Selain itu, adanya perbedaan jumlah kuota antara jalur reguler dan aspirasi menunjukkan bahwa distribusi tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme kebijakan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh proses pengusulan melalui jalur politik. Dengan demikian, pola distribusi dalam program ini mencerminkan karakteristik utama *pork barrel politics*, yaitu alokasi selektif yang diarahkan kepada kelompok dan wilayah tertentu dengan pertimbangan

sosial sekaligus politis.

3.4 Waktu Distribusi

Dalam konteks program KIP-K Aspirasi Hetifah, waktu distribusi bantuan menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya acak, melainkan mengikuti dinamika siklus kebijakan dan politik. Program ini dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, sehingga tidak bersifat insidental, tetapi menjadi bagian dari agenda yang terus dijalankan selama periode representasi politik berlangsung. Dengan demikian, distribusi bantuan berada dalam kerangka siklus politik yang lebih luas, di mana kebijakan aspirasi dijalankan secara periodik sebagai bagian dari fungsi representasi legislator.

Keberlanjutan program ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan jangka pendek, tetapi juga oleh kesinambungan peran legislator dalam memperjuangkan program di tingkat kebijakan. Hal ini mencerminkan bahwa waktu distribusi selaras dengan masa jabatan dan aktivitas politik legislator, sehingga program terus diupayakan untuk berjalan setiap tahun dengan cakupan yang semakin luas.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan adanya keterkaitan antara pelaksanaan program dengan momentum elektoral. Peningkatan perolehan suara pada Pemilu 2024 dibandingkan periode

sebelumnya terjadi dalam kurun waktu pelaksanaan program yang berlangsung secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan tidak hanya berada dalam ruang kebijakan publik, tetapi juga beririsan dengan dinamika kontestasi politik.

Dengan demikian, waktu distribusi program dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika yang tidak terlepas dari siklus politik dan momentum elektoral. Program ini tidak hanya berjalan sebagai kebijakan sosial, tetapi juga berada dalam konteks temporal yang berpotensi memperkuat hubungan antara kebijakan publik dan proses politik dalam sistem demokrasi.

3.5 Tujuan Distribusi

Tujuan distribusi dalam program Beasiswa KIP Kuliah Aspirasi Hetifah menunjukkan adanya dua dimensi utama, yaitu sebagai bentuk pelayanan publik dalam meningkatkan akses pendidikan, serta sebagai sarana membangun dan merawat hubungan antara legislator dan konstituen.

Dalam dimensi pelayanan publik, program ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan yang diberikan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan studi mahasiswa, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Dengan demikian, secara substantif program ini

memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional.

Di sisi lain, program ini juga berfungsi sebagai sarana membangun *engagement* antara legislator dan konstituen. Keterlibatan masyarakat dalam program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk hubungan yang lebih dekat melalui pengalaman langsung dalam menerima manfaat kebijakan. *Engagement* ini terbentuk secara bertahap, dimulai dari pengenalan terhadap sosok legislator, interaksi melalui program, hingga berkembang menjadi kedekatan yang lebih berkelanjutan.

Program ini juga memiliki makna simbolik sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian wakil rakyat terhadap masyarakat di daerah pemilihannya. Melalui bantuan yang diberikan, legislator tidak hanya menjalankan fungsi representasi secara formal, tetapi juga membangun citra positif di mata konstituen. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan tidak hanya memiliki tujuan sosial, tetapi juga memiliki dimensi politik dalam membangun legitimasi.

Implikasi dari terbentuknya *engagement* tersebut terlihat pada pembentukan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat. Program bantuan pendidikan menjadi salah satu rujukan utama dalam menilai kinerja legislator, sehingga pengalaman langsung

masyarakat terhadap kebijakan turut membentuk legitimasi politik. Selain itu, terdapat indikasi hubungan timbal balik yang terbentuk secara implisit melalui keterlibatan penerima dalam jejaring program, meskipun tidak terdapat kewajiban politik yang dinyatakan secara eksplisit.

Secara keseluruhan, tujuan distribusi program KIP-K Aspirasi Hetifah tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen dalam membangun, memperkuat, dan merawat hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan memiliki dimensi ganda, yaitu sebagai kebijakan sosial sekaligus sebagai strategi politik dalam kerangka *pork barrel politics*.

C. PENUTUP

C.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Kebijakan Aspirasi pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda dijalankan sebagai bentuk kebijakan aspirasi yang mengintegrasikan fungsi sosial dan fungsi politik secara simultan. Program ini tidak hanya berperan dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari kelompok ekonomi kurang mampu yang belum terakomodasi dalam skema KIP-K Reguler, tetapi juga menjadi sarana distribusi manfaat yang terhubung

dengan fungsi representasi politik melalui peran legislator dalam mekanisme aspirasi.

Dalam praktiknya, distribusi bantuan menunjukkan karakteristik utama *pork barrel politics*, yaitu adanya penargetan kelompok tertentu, keterkaitan dengan daerah pemilihan (dapil), keterlibatan jaringan aktor politik, serta keberlanjutan program dalam dinamika politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan juga berfungsi sebagai strategi politik distributif. Melalui pemberian bantuan yang berkelanjutan, interaksi, dan pendampingan, program ini membentuk relasi yang lebih dekat antara legislator dan masyarakat, sekaligus mendorong terbentuknya *political engagement* yang berbasis pada pengalaman langsung penerima manfaat.

Keberlanjutan relasi tersebut berkontribusi pada terbentuknya persepsi positif dan legitimasi politik, yang tercermin dalam dukungan elektoral di daerah pemilihan. Di sisi lain, pelaksanaan program didukung oleh kebutuhan riil masyarakat, koordinasi antar aktor, komitmen politik, serta respons positif konstituen, namun juga menghadapi sejumlah hambatan seperti keterbatasan jangkauan, mekanisme pendanaan, komunikasi pasca seleksi, serta potensi politisasi dalam distribusi bantuan.

Dengan demikian, Program Beasiswa

KIP Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda dapat disimpulkan sebagai praktik kebijakan aspirasi dalam kerangka *pork barrel politics*, yang memadukan tujuan kebijakan publik dengan strategi representasi politik dalam membangun dan merawat relasi antara wakil rakyat dan konstituen.

C.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya penguatan implementasi kebijakan serta pengembangan kajian akademik di masa mendatang:

1. Aspek kebijakan

Perlu adanya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan berbasis aspirasi, khususnya pada mekanisme seleksi penerima dan distribusi informasi. Hal ini penting agar akses terhadap bantuan lebih merata dan tidak bergantung pada jejaring tertentu, sehingga tujuan afirmatif kebijakan dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

2. Aspek implementasi

Legislator dan tim pelaksana diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi program melalui saluran yang lebih inklusif dan sistematis. Penyebaran informasi yang lebih terbuka akan membantu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki

keterbatasan akses.

3. Aspek relasi politik

Perlu adanya upaya menjaga keseimbangan antara fungsi representasi politik dan prinsip netralitas kebijakan publik. Program bantuan sebaiknya tetap difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara objektif agar tidak menimbulkan persepsi sebagai instrumen kepentingan politik jangka pendek.

4. Aspek akademis

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti studi komparatif antar daerah maupun metode campuran (*mixed methods*). Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada analisis dampak jangka panjang terhadap perilaku politik masyarakat guna memperdalam pemahaman hubungan antara kebijakan publik dan demokrasi representatif.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat berkontribusi tidak hanya pada perbaikan implementasi kebijakan KIP-K Aspirasi, tetapi juga dalam pengembangan kajian akademik mengenai praktik *pork barrel politics* di Indonesia.

C.3 Kelemahan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil secara proporsional, yaitu:

1. Keterbatasan ruang lingkup (studi

kasus)

Penelitian ini berfokus pada studi kasus Program KIP-K Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Temuan penelitian lebih merefleksikan konteks spesifik dibandingkan gambaran umum praktik kebijakan aspirasi di daerah lain.

2. Keterbatasan data kuantitatif

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam akses data kuantitatif, seperti jumlah penerima, distribusi anggaran, serta perbandingan dengan jalur reguler. Akibatnya, analisis lebih bertumpu pada data kualitatif, yang meskipun memberikan kedalaman, masih terbatas dalam aspek pengukuran komparatif.

3. Potensi bias subjektivitas informan

Terdapat potensi bias subjektivitas, terutama dari informan penerima manfaat yang cenderung memiliki persepsi positif terhadap program. Hal ini dapat memengaruhi objektivitas dalam melihat kekurangan atau kritik terhadap program.

4. Keterbatasan perspektif aktor

Penelitian ini belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif dari kelompok non-penerima maupun aktor di luar jaringan program. Akibatnya, dinamika distribusi kebijakan belum tergambarkan secara menyeluruh.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prena Media Group (Divisi Kencana).
- Anton, Julistya, Ayu Sri Asih, Nurfatimah, Y., Huzaimah, S., & Farid, M. R. (2025). Analisis permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia (*Analysis of educational problems that happened in Indonesia*). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1203–1213. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada Pemilu legislatif 2014* [Money politics in Indonesia: Patronage and clientelism in the 2014 legislative election] (1st ed.). Research Centre for Politics and Government.
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2025). *Statistik daerah Kota Samarinda 2025*. In *Statistik Daerah Kota Samarinda*. <https://samarindakota.bps.go.id/id/publication/2025/12/22/9a52d10e85abd43332f85042/statistik-daerah-kota-samarinda-2025.html>
- BBC News Indonesia. (2015, June 16). *Dana aspirasi DPR dan kontroversinya*. https://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/06/150616_forum_dana_dpr
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Erawati. (2020). Polemik dana aspirasi dalam perspektif politik hukum penganggaran Indonesia. *Simbur Cahaya*, 178–196. <https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.500>
- Ferejohn, J. A. (1974). *Pork barrel politics: Rivers and harbors legislation, 1947–1968*. Stanford University Press. <https://archive.org/details/porkbarrelpoliti0000fere/mode/2up>
- Hetifah Sjaifudian. (2024, March 4). Dipastikan lolos ke DPR, Hetifah Sjaifudian fokus dengan perjuangan,

- tidak serta-merta politik uang. <https://hetifah.id/artikel/dipastikan-lolos-ke-dpr-hetifah-sjaifudian-fokus-dengan-perjuangan-tidak-serta-merta-politik-uang.html>
- Huberman, M. B., & Miles, A. M. (2014). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode kualitatif*. UI-Press. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20399460>
- Kemendiktisainstek. (2025). *Pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2025*. Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. <https://kip-kuliah.kemdiktisainstek.go.id/>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi*. https://lldikti6.id/wp-content/uploads/2022/08/Persesjen-10-Tahun-2022-PIP-Pendidikan-Tinggi_9e0f29.pdf
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023, February 10). *KPU RI: 107 juta pemilih muda dominasi Pemilu 2024*. ANTARA News. <https://www.antarane.ws.com/berita/3390438/kpu-ri-107-juta-pemilih-muda-dominasi-pemilu-2024>
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi penelitian kualitatif: Pendekatan positivistik, rasionalistik, fenomenologik, dan realisme metafisik; telaah studi teks dan penelitian agama* (3rd ed.). Rake Sarasin. https://books.google.co.id/books/about/Metodologi_penelitian_kualitatif.html?id=3oXwAAAACAAJ&redir_esc=y
- Muhammad Ishak Syahadat, Iriyani Astuti Arief, & Efrianto, L. O. (2024). Politik pork barrel: Bantuan sosial (Bansos) Jokowi menjelang Pemilihan Presiden 2024. *Journal Publicuho*, 7(4), 2340–2350. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.621>
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Satria. (2010, June 9). *Dana aspirasi tidak relevan dengan fungsi DPR*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/848-dana-aspirasi-tidak-relevan-dengan-fungsi-dpr/>
- Smith, K. (2011). Pork barrel politics: Motives and benefits. *The Journal of Political Research*, 2(-), 1–28.
- Stokes, S., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (19th ed.). Penerbit Alfabeta.
- Susanto, M. (2017). Kedudukan dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(2), 255–278.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
- Yusuf, E., & Sari, W. (2022). Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(3), 189–196. <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496>

